

Rilis Seknas FITRA
Rabu, 24 Mei 2017

Fakta Dibalik Predikat WTP LKPP 2016 : Disklaimer dan Masih Ada Indikasi Korupsi

Kondisi Terkini

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor. Penyampaian LKPP tahun 2016 ini dilakukan langsung oleh Kepala BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Selasa, Jakarta (23/5/2017). Hasilnya, pada 19 Mei BPK menyampaikan hasil LKPP tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Pemerintah (DPR) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menanggapi hasil audit LKPP BPK tersebut, Presiden Joko Widodo merasa ini adalah keberhasilan rekor sejak 12 tahun sebelumnya. Hasil audit ini juga di yakini dapat meningkatkan minat investasi ke dalam negeri dengan naiknya peringkat investasi Indonesia sesuai S&P.

Fakta Data

Temuan Hasil Sistem Pengendalian Internal (SPI)

1. Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi.
2. Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai.
3. Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) tidak konsisten.
4. System pengendalian piutang pajak belum memadai.
5. Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai.
6. Penatausahaan persediaan pada 57 kementerian Negara/lembaga sebesar Rp. 867,95 miliar belum tertib.
7. Penatausahaan asset tetap pada 70 kementerian/lembaga senilai Rp. 10,07 triliun belum tertib dan belum dimanfaatkan.
8. Penatausahaan asset tidak terwujud senilai Rp/ 375,99 miliar pada 23 kementerian lembaga belum tertib dan belum dimanfaatkan.
9. Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai :

Temuan Terhadap Kepatuhan Perundang-undangan :

1. Pengelolaan PNPB pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp. 1.30 serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp. 3,82 Triliun belum sesuai ketentuan.
2. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp. 879,02 Miliar.
3. Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp. 2,85 triliun pada KL tidak sesuai ketentuan.
4. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L

sebesar Rp. 9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp. 1,11 Triliun dan USD 1,299,20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 KL sebesar Rp. 497,38 Miliat tidak sesuai dengan ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 KL sebesar Rp. 4,88 triliun tidak memadai.

Perkembangan LKPP Pemerintah dari Tahun 2012-2016

Opini	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	62	65	62	56	74
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	22	19	18	26	8
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	3	3	7	4	6
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	87	87	87	86	88

Keterangan KL Disclaimer :

Nama KL	2014	2015	2016	Keterangan
Komnas HAM	v	v	v	Masalah Internal Berlarut larut
TVRI	-	v	v	Adanya korupsi di TVRI
Bakamla	-	-	v	Korupsi Pengadaan di Bakamla
Ekonomi Kreatif	-	-	v	Lembaga baru
Kemenpora	-	v	v	Korupsi Wisma Atlet, Hambalang dan Aset
Kementrian Kelautan dan Perikanan	-	-	v	Korupsi Pengadaan Kapal dan Prosedur pengadaan kapal yang bermasalah.

Dua Bukti Lemahnya Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK

1. BLBI Masih Membebani APBN dan Keuangan Negara

Piutang pada BA 999.99 sebesar Rp76.559.387.124.985, terdiri dari Piutang Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp68.388.414.083.140 dan eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp8.170.973.041.845. Piutang Aset Kredit eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.851.888.132.385, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp76.559.387.124.985 dikurangi penyisihan sebesar Rp73.707.498.992.600. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
Aset kredit eks BPPN	68.388.414.083.140	68.635.285.418.172
Eks Kelolaan PT PPA	8.170.973.041.845	8.234.224.949.166
Piutang(Bruto)	76.559.387.124.985	76.869.510.367.338
Penyisihan	(73.707.498.992.600)	(74.392.631.391.947)
Piutang(Bersih)	2.851.888.132.385	2.476.878.975.391

Aset kredit eks BPPN sebesar Rp68.388.414.083.140 merupakan aset Pemerintah hasil penyitaan oleh pemerintah karena para debitur tidak mampu melunasi utangnya kepada Pemerintah atas fasilitas likuiditas yang dikucurkan pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Aset-aset tersebut pada awalnya dikelola oleh BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian dana talangan kepada perbankan yang memiliki CAR(*Capital Adequate Ratio*) di bawah batas minimal yang ditetapkan BI. Setelah BPPN dibubarkan kemudian sebagian pengelolaannya beralih pada Tim Pemberesan BPPN. Aset-aset yang dikelola oleh Tim Pemberesan BPPN adalah aset-aset yang masih berperkara.

Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp68.388.414.083.140 dan Rp68.635.285.418.172. Perubahan nilai aset kredit eks BPPN disebabkan adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, koreksi besaran piutang negara, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, serta pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih(PSBDT). Rincian Aset kredit eks BPPN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (<i>audited</i>)	31 Desember 2015 (<i>audited</i>)
Aset Kredit yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negeranya Kepada PUPN(telah tahap PB/PJPN)	18.695.268.744.758	19.012.921.726.864
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham(PKPS)	23.596.898.822.480	23.693.381.757.810
Aset Kredit <i>Asset Transfer Kit</i> (ATK) yang Masih dikelola Kementerian Keuangan	23.471.068.347.196	23.312.295.670.821
Aset Kredit ATK Lainnya	2.625.178.168.706	2.616.686.262.677
Jumlah	68.388.414.083.140	68.635.285.418.172

an PKPS yang telah memenuhi syarat pengakuan sebagai Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 16 *obligor* dengan nilai sebesar Rp23.596.898.822.480, sedangkan tagihan PKPS per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp23.693.381.757.810.

Aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp8.170.973.041.845 merupakan hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan pengelolaannya kepada PT PPA kemudian dikembalikan ke Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Februari 2009. Pengelolaan atas aset eks kelolaan PT PPA ini oleh Kementerian Keuangan dilakukan melalui mekanisme penyerahan kepada PUPN, namun sebagian aset kredit ini masih dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp4.261.707.812.149. Jumlah aset kredit eks kelolaan PT PPA yang diurus oleh PUPN per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.909.265.229.696.

2. Dugaan Korupsi Hotel Indonesia dan Grand Indonesia senilai Rp. 1,2 T menguap dari Pidana ke Perdata di Kejaksaan.

Hasi Audit BPK tahun 2016 terhadap kontrak Built, Operate, and Transfer (BOT) antara PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dengan PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI)- PT Grand Indonesia (GI) menemukan dugaan korupsi Rp. 1,2 T hingga kontrak 50 tahun kedepan. Bahkan dari hitungan internal HIN, mencapai Rp. 76 T hingga 2050.

Kesimpulan dan Saran :

1. Predikat WTP tidak layak diberikan oleh BPK terhadap LKPP kinerja laporan keuangan KabinetKepemimpinan Joko Widodo.
2. Jangan jadikan predikat ini sebagai kegembiraan bahkan pencitraan kepada dunia ekonomi sehingga Investor tertarik. Karena masih banyak masalah, terutama dengan penarikan pajak dan kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Kementrian/Lembaga Disklaimer harus di sanksi berat, pemotongan anggaran hingga evaluasi kementerian.
4. Khusus Komnasham, karena dalam seleksi anggota Komnas HAM dibutuhkan anggota yang antikorupsi.
5. Khusus untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, harus dievaluasi terkait dengan program pengadaan kapal di seluruh Indonesia, sudah ada beberapa tersangka di daerah.
6. Khusus untuk Kemenpora harus berbenah, sudah dua kali disclaimer dan masih lekat dengan korupsi. Terbaru dalam kasus persiapan ASIANGAME 2018.
7. Khusus untuk TVRI yang sudah ketiga kali, maka harus diganti kepengurusan dan diberi sanksi berat.
8. Khusus bakamla dan ekonomi kreatif sebagai lembaga baru, harus menerapkan system yang transparan dan akuntabel.
9. BLBI selaku menjadi beban APBN, maka harus segera dituntaskan oleh KPK.
10. Untuk Hotel Indonesia, KPK juga harus ambil alih kasus ini agar tidak menguap di Kejaksaan seperti SKL BLBI bertahun tahun lalu.

Demikian

Yenny Sucipto Sekjen FITRA 08133111446